

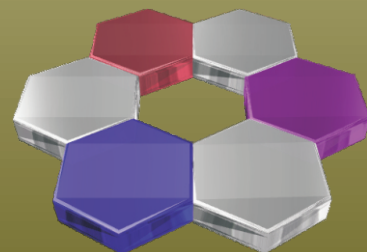


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: dispenda@ntbprov.go.id, www.dispenda.ntbprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau yang sekarang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

Adapun LKjIP/LAKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan materi analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016.

LKjIP/LAKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa mendatang. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKjIP/LAKIP di tahun mendatang .

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 2017

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H. ISWANDI M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi Dan Personalia	3
C. Isu-isu strategik	4
D. Permasalahan yang dihadapi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategik	6
1. Visi	6
2. Misi	6
3. Aspek strategik	7
4. Tujuan dan sasaran	8
5. Cara mencapai tujuan dan sasaran	9
B. Rencana Kinerja	11
1. Kegiatan yang akan dilaksanakan	11
2. Sasaran dan Indikator Keberhasilan	11
C. Perjanjian Kinerja	12
1. Kegiatan Yang Akan Ditetapkan	12
2. Indikator keberhasilan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. REALISASI ANGGARAN	34
BAB IV PENUTUP	56
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Lampiran I : Rencana Setrategis (1 dokumen)	
2. Lampiran II : Indikator Kinerja Utama	
3. Lampiran III : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016	
4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2016 (1 Dokumen)	
5. Pengukuran Dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2016	
6. Laporan Pendukung LAKIP Tahun 2016	

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Data Target dan Realisasi Pajak dan denda Pajak 2016.....	13
Tabel 3.2	Data Target dan Realisasi PKB Tahun 2016.....	13
Tabel 3.3	Data Target dan Realisasi BBNKB Tahun 2016.....	14
Tabel 3.4	Data Target dan Realisasi Denda Pajak Tahun 2016.....	14
Tabel 3.5	Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016.....	15
Tabel 3.6	Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 - 2016.....	18
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2018.....	21
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 Dengan Proyeksi Tahun 2016 dalam RPJMD.....	23
Tabel 3.9	Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan.....	30
Tabel 3.10	Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah.....	32
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran UPTD PPDRD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB.....	35
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Per-Program Kegiatan.....	35
Tabel 3.13	Capaian Program.....	39
Tabel 3.14	Jumlah Nilai Capaian.....	39

EXECUTIVE SUMMARY

Keberhasilan pencapaian sasaran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata dari peningkatan kinerja aparat Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pengelola pajak daerah telah menjalankan fungsinya selaku koordinator bidang pendapatan daerah yang di dukung sarana dan prasarana yang baik, intensitas pengelolaan pendapatan daerah dengan seluruh unsur yang terkait disertai dengan peningkatan koordinasi semua pihak.

Pencapaian kinerja keuangan tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 73,78%, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 2,19%. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 5,36% (dalam urutan ketiga) setelah jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 18,67%.

Terhadap Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 dalam RPJMD, Pencapaian realisasi PAD pada tahun 2016 mencapai 106,42% dengan realisasi PAD sebesar Rp. 1.359.744.173.372,97 dari proyeksi PAD Tahun 2016 (RPJMD) sebesar Rp. 1.277.715.897.000,00

Berdasarkan hasil kinerja ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus berupaya untuk senantiasa memperhatikan bagaimana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akan dibuat sehingga dapat dinilai efektif dan efisien serta dapat digunakan untuk evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja periode berikutnya dalam rangka mempermudah proses manajerial guna pengambilan keputusan berupa kebijakan-kebijakan mana yang seperlunya akan diambil.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Anggaran 2016 disusun dan sejatinya laporan ini dapat dijadikan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Mataram, Januari 2017
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H. Iswandi, M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atau yang dahulu disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.

Dalam penyusunannya, LKjIP/LAKIP Bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Disajikan gambaran umum organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan isu-isu strategis serta berbagai permasalahan empiris yang sedang dihadapi.

A. DATA UMUM ORGANISASI

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara sederhana dapat digolongkan dalam ruang lingkup yang bersifat Umum dan ruang lingkup yang bersifat Khusus. Ruang lingkup secara "Umum" dalam Kedudukannya sebagai Organisasi (*Organisatoris*) Kelembagaan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara historis pertama kali dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTB Nomor 8 Tahun 1978, seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan organisasi telah terjadi perubahan struktur dan yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ruang lingkup tugas dan fungsi yang secara “Khusus” dalam Kedudukan Protokoler pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tercermin pada Pasal 1 angka 1 UU No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK) yang menyatakan pejabat yang berwenang ditingkat Provinsi adalah Gubernur atau “pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan per-Undangan- Undangan Pajak Daerah” dan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Dan Retribusi Daerah, UU No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPDSP) dan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2008, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menegaskan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

dan Lain-lain PAD yang sah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu bagian dari *continuous improvement* (tindakan berkesinambungan), maka setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang mendapat penyempurnaan, yaitu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (*Local taxing empowerment*) dan Peningkatan efektifitas pengawasan. Selain mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dipenda Provinsi NTB juga melakukan tugas pokok pemungutan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, sedangkan untuk Pajak Rokok yang juga sebagai salah satu obyek yang kewenangan pemungutannya telah diberikan kepada daerah, akan dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang ini yang telah menetapkan tanggal mulai berlakunya pada 1 Januari 2014.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 Tahun 2008, terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pajak dan Dana Perimbangan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, serta 12 Seksi/Subbag sedangkan pada 9 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) masing-masing terdiri dari 1 orang Kepala UPTD dan 3 Seksi/Subbag. (Struktur Organisasi Dipenda terlampir).

2. Personalia Dipenda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh personil sebanyak 323 PNS. Jumlah tersebut masih dirasakan perlu penambahan untuk melaksanakan semua kegiatan pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pada UPTD PPDRD di pulau Sumbawa.

Secara rinci jumlah personil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, baik yang berada pada Kantor Induk maupun pada Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah seperti terlampir.

C. ISU-ISU STRATEGIK

Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Melemahnya perekonomian masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan membayar pajak.
2. Kevalidan data potensi pendapatan.
3. Pengelolaan pelayanan pendapatan.
4. Dukungan Teknologi Informasi dalam upaya intensifikasi pendapatan daerah.
5. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah

D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola pendapatan antara lain:

1. Kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang menyebabkan masih adanya tunggakan pajak.
2. Belum tersedianya data potensi yang valid.
3. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

4. Kondisi dan lokasi aset Pemerintah Daerah yang kurang kompetitif dibandingkan dengan aset yang dikelola swasta.
5. Pelayanan kepada masyarakat WP/WR belum optimal dan Kinerja Birokrasi Pada Umumnya Rendah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

1. Visi

Sebagai gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan, selanjutnya akan dijabarkan pada Misi, Program dan kegiatan, maka dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING" (NTB Bersaing)", Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi yaitu:

**"Menjadi Koordinator Pendapatan Dan Penghimpun
Pajak Daerah Yang Proporsional, Berkesinambungan dan Akuntabel"**

Visi ini memberikan gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai masyarakat NTB dan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan Umum peningkatan Pendapatan Daerah yaitu :

- a. Memantapkan pengelolaan keuangan Daerah
- b. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap
- c. Mendorong peningkatan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengelola pendapatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Visi tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan dan menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kemampuan sumber pendanaan daerah yang proporsional dan berkesinambungan.

- b. Mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel.

3. Aspek Strategik

Dari hasil telaahan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah didapatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

Dalam lingkungan internal ada 2 faktor yang berpengaruh yaitu Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan.

1). Faktor Kekuatan

Hal-hal yang menjadi faktor kekuatan disini adalah sebagai berikut :

- a). Tersedianya personil
- b). Tersedianya Dana
- c). Komitmen Dispenda
- d). Memiliki Program Kerja

2). Faktor Kelemahan

Faktor-faktor kelemahan yang ada adalah sebagai berikut:

- a). Kualitas SDM masih rendah
- b). Belum tersedianya data potensi yang valid
- c). Pelayanan kepada masyarakat WP/WR belum optimal.
- d). Kinerja Birokrasi pada Umumnya Rendah.

b. Lingkungan Eksternal

Dalam lingkungan Eksternal ada 2 faktor yang berpengaruh yaitu Faktor Peluang dan Faktor Ancaman :

1). Faktor Peluang

Yang menjadi Faktor Peluang di sini adalah :

- a). Adanya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan, UU No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK), UU No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPDSP) dan Adanya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b). Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD.
- c). Bertambahnya Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- d). Adanya kesadaran masyarakat sebagai WP/WR.

2). Faktor Ancaman

Yang menjadi Faktor Ancaman disini adalah:

- a). Krisis Ekonomi
- b). Gangguan Kamtibmas
- c). Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah
- d). Tuntutan Masyarakat Terhadap Fasilitas Pelayanan.

4. Tujuan Dan Sasaran

Dengan mengacu pada visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut:

a. Tujuan

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPJMD maka ditetapkan tujuan yang dirangkum menjadi :

- 1). Meningkatkan sumber pendanaan daerah
- 2). Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah

b. Sasaran

Dengan mengacu kepada RPJMD lebih lanjut ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1). Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat.
- 2). Tersedianya sistem pelayanan PAD.
- 3). Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya.
- 4). Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik.

5. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berlandaskan pada dasar-dasar tersebut di atas, maka upaya penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daerah, dicantumkan pada kebijakan umum peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. kerjasama dengan lembaga /instansi terkait
- b. kerjasama dengan pemerintah, kab./kota
- c. kerjasama dengan lembaga /instansi terkait
- d. kerjasama pemerintah pusat

Langkah dan upaya – upaya dalam rangka peningkatan PAD, pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui 8 (Delapan) program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) *kegiatan* yang pengelolaannya pada 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sebagai unsur pelaksana, dengan masing-masing melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. *Sekretariat*

- 1). Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 2). Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 3). Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4). Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5). Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- 6). Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7). Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8). Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 9). Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10). Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- 11). Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12). Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

- 13). Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
 - 14). Kegiatan Pembangunan gedung kantor
 - 15). Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 16). Kegiatan pengadaan meubelair
 - 17). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 18). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 19). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - 20). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - 21). Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
 - 22). Kegiatan Program Mental dan Fisik Aparatur
 - 23). Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 24). Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 25). Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - 26). Kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait
 - 27). Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Kepegawaian
 - 28). Kegiatan Peningkatan Management Asset/barang Daerah
 - 29). Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
- b. *Bidang Pajak dan Dana Perimbangan*
Kegiatan Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan.
- c. *Bidang Pajak*
Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah dan Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
- d. *Bidang Retribusi dan Pendapatan lainnya*
- 1). Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

- 2). Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi data penerimaan retribusi dan PLL.
 - 3). Kegiatan Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL
 - 4). Kegiatan Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - 5). Kegiatan Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL
 - 6). Kegiatan Aplikasi Online Retribusi
- e. *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjalani kegiatan:*
- 1). Kegiatan Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
 - 2). Kegiatan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor
 - 3). Kegiatan Pembangunan gedung kantor
 - 4). Selain 3 kegiatan dimaksud, kegiatan yang juga turut dilaksanakan oleh *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*, seperti dalam kegiatan sekretariat pada angka 1 sd 20 kecuali kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

Rencana Kinerja Tahunan dari Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2016 dibuat berdasarkan program – program yang terdapat dalam Rencana Strategik. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 adalah sebagaimana telah dituangkan dalam Form **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)** terlampir (Lampiran...).

2. Sasaran dan Indikator Keberhasilannya

Masing – masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dibuatkan indikator kinerja yang terdiri dari unsur; Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome). Sasaran dan Indikator kinerja dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sesuai Form **Pengukuran Kinerja (PK)** terlampir (Lampiran...).

C. PERJANJIAN KINERJA

1. Kegiatan Yang Akan Ditetapkan

Penetapan Kinerja Tahunan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2016 dibuat berdasarkan program – program yang terdapat dalam Rencana Strategik. Kegiatan – kegiatan yang akan ditetapkan pada Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 adalah sesuai dengan Form **Penetapan Kinerja (PK)** terlampir (Lampiran...)

2. Indikator Keberhasilannya

Masing – masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dibuatkan indikator kinerja yang terdiri dari unsur; Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome). Sasaran dan Indikator kinerja dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sesuai Form **Capaian Kinerja (PK)** terlampir (Lampiran...).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2016 Capaian Target dan Realisasi PAD 2016 yang dikelola langsung oleh Dipenda.

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 yang dikoordinir dan dihimpun langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB di 9 UPTD Dipenda sejumlah Rp. 1.056.098.159.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.022.895.814.151,00 atau 96,86% dengan rincian sebagai berikut :

- a. PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Denda Pajak (Lain-Lain PAD yang Sah).

Tabel 3.1

Data Target dan Realisasi Pajak daerah dan Denda Pajak tahun 2016

Jenis Pajak	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
1 PKB	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48
2 BBNKB	318.503.155.000	322.208.887.701	101,16
3 PBBKB	192.900.000.000	188.945.861.622	97,95
4 Pajak Air Permukaan	300.000.000	361.290.857	120,43
5 Pajak Rokok	227.693.444.000	222.556.939.857	80,14
6 Denda Pajak	18.548.560.000	19.634.060.483	105,85
Jumlah	1.056.098.159.000	1.022.895.814.151	96,86

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

- b. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tabel 3.2

Data Target dan Realisasi PKB Tahun 2016

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
1 Mataram	88.036.572.000	88.888.793.805	103,32
2 Lombok Barat	28.423.220.000	30.126.889.110	105,99
3 Lombok Utara	6.651.423.000	8.477.225.617	127,45
4 Lombok Tengah	33.246.442.000	37.055.803.776	111,46
5 Lombok Timur	36.492.414.000	40.134.619.809	109,98
6 Sumbawa	19.330.379.000	21.077.352.133	109,04
7 Sumbawa Barat	13.063.598.000	15.637.707.858	119,70
8 Dompu	7.135.313.000	7.530.942.967	105,54
9 Kab. Bima	7.455.885.000	8.793.651.686	117,94
10 Kota Bima	10.317.754.000	11.464.990.780	111,12
Jumlah	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

c. Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tabel 3.3

Data Target dan Realisasi BBNKB tahun 2016

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
1 Mataram	88.217.042.000	88.750.043.334	100,60
2 Lombok Barat	44.806.080.000	58.359.055.747	130,25
3 Lombok Utara	13.188.012.000	-	0,00
4 Lombok Tengah	46.143.610.000	46.642.700.157	101,08
5 Lombok Timur	55.404.156.000	55.757.219.048	100,64
6 Sumbawa	24.530.826.000	26.280.750.366	107,13
7 Sumbawa Barat	13.229.500.000	14.055.787.009	106,25
8 Dompu	11.200.800.000	9.869.342.560	88,11
9 Kab. Bima	9.976.046.000	10.667.507.201	106,93
10 Kota Bima	11.807.083.000	11.826.482.279	100,16
Jumlah	318.503.155.000	322.208.887.701	101,16

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

d. Denda Pajak (Lain-Lain PAD Yang Sah)

Tabel 3.4

Data Target dan Realisasi Denda Pajak tahun 2016

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
Denda PKB			
1 Mataram	4,716,455,000	5,900,994,481	125.12
2 Praya	2,964,362,600	2,780,920,166	93.81
3 Selong	3,004,283,600	3,089,663,486	102.84
4 Sumbawa	1,675,274,300	1,616,126,494	96.47
5 Bima	1,504,520,800	1,691,434,129	112.42
6 Dompu	889,072,600	602,053,236	67.72
7 Gerung	2,165,224,400	1,924,735,337	88.89
8 Sumbawa Barat	887,059,700	1,005,251,893	113.32
9 Tanjung	642,307,000	657,351,848	102.34
Jumlah	18.448.560.000	19.268.531.170	104,44
Denda BBNKB			
1 Mataram	30,210,600	126,307,796	418.09
2 Praya	8,500,800	48,957,177	575.91
3 Selong	13,744,600	41,943,963	305.17
4 Sumbawa	9,177,500	20,483,190	223.19
5 Bima	7,975,800	44,694,173	560.37
6 Dompu	2,272,800	6,311,971	277.72
7 Gerung	10,080,000	35,215,672	349.36
8 Sumbawa Barat	17,456,900	41,615,371	238.39
9 Tanjung	581,000	-	-
Jumlah	100.000.000	365.529.313	365,53

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

2. Perbandingan Target Tahun 2016 dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2016.

Target Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 sebesar Rp. 3.802.933.445.799,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.949.896.942.277,97 atau 103,86 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2016 (Rp.)	Realisasi* 2016 (Rp.)	Capaian Pendapatan
1	2	3	4
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	3.802.933.445.799,00	3.949.896.952.277,97	103,86
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.450.044.930.319	1.359.744.173.372,97	93,77
a) PAJAK DAERAH	1.037.549.599.000	1.003.260.953.668,00	96,70
b) RETRIBUSI DAERAH	29.890.858.000	29.791.594.549,00	99,67
c) HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	157.964.885.190	72.827.611.744,00	46,10
d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	224.639.588.129	253.864.013.411,97	113,01
2 DANA PERIMBANGAN	2.333.604.004.580	2.583.032.589.905	110,69
3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.284.510.900	7.120.189.000	36,92
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	3.802.933.445.799,00	3.949.896.952.277,97	103,86

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kelompok Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target sebesar Rp.1.450.044.930.319,00 dan realisasi sebesar Rp.1.359.744.173.372,97 atau 93,77 %,
- b. Dana Perimbangan Rp. 2.333.604.004.580,00 dengan realisasi Rp.2.583.032.589.905 atau 110,69%, dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 19.284.510.900 dengan realisasi Rp 7.120.189.000 atau 36,92%.

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pada TA. 2016 PAD ditargetkan sebesar Rp.1.450.044.930.319 dengan realisasi Rp.1.359.744.173.372,97 atau 93,77 %, terdiri atas :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, direncanakan sebesar Rp.1.037.549.599.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.260.953.668 atau 96,70%.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri atas :

- 1). Retribusi Jasa Umum
- 2). Retribusi Jasa Usaha
- 3). Retribusi Perijinan tertentu

Secara keseluruhan, pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 29.890.858.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp.29.791.594.549 atau 99,67%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyertaan modal pada perusahaan daerah yaitu terdiri atas:

- 1). PT. Bank Nusa Tenggara Barat
- 2). PD. BPR LKP
- 3). PT. Gerbang Mas NTB
- 4). PT. Daerah Mandiri Bersaing(DMB)
- 5). PT. Suara Nusa Media Pratama
- 6). PT. Jam Krida
- 7). PT. Asuransi Bangun Askrida

Pada tahun 2016, telah dicapai realisasi sebesar Rp. 72.827.611.744 dari rencana sebesar Rp. 157.964.885.190 atau 46,10%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini bersumber dari penerimaan-penerimaan diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016 Secara keseluruhan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.224.639.588.129 dengan realisasi sebesar Rp.253.864.013.411,97 atau 113,01%.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2016 direncanakan sebesar Rp.2.333.604.004.580 dengan realisasi sebesar Rp. 2.583.032.589.905 atau 110,69%.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase sesuai kriteria yang ditetapkan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam

rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2016 direncanakan sebesar Rp.247.954.406.000 dengan realisasi sebesar Rp. 375.036.424.549 atau 151,25%.

- b. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2016 direncanakan sebesar Rp.955.792.513.580 dengan realisasi sebesar Rp. 1.117.691.709.000 atau 116,94%.
- c. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA. 2016 direncanakan sebesar Rp.1.129.857.085.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.090.304.456.356 atau 96,50%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari dana hibah dan dana penyesuaian, yang secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.19.284.510.900 dengan realisasi sebesar Rp. 7.120.189.000 atau 36,92%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2015 dengan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2016.

Tabel 3.6

Tabel Pertumbuhan Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah 2015 - 2016.

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2015 (Rp.)	Realisasi 2015 (Rp.)	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6=4:2x100-100	7=5:3x100-100	9=(5-3)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	3.555.509.042.478,44	3.448.114.153.634,75	3.802.933.445.799,	3.949.896.952.277,97	6,96	14,55	501.782.798.643,22
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.420.471.239.378,00	1.372.108.887.856,75	1.450.044.930.319	1.359.744.173.372,97	2,09	(0,91)	(12.364.714.483,78)
a PAJAK DAERAH	1.008.440.439.200,00	1.010.655.242.476,00	1.037.549.599.000	1.003.260.953.668	2,89	(0,73)	(7.394.288.808,00)
b RETRIBUSI DAERAH	22.920.317.650,00	24.357.011.304,86	29.890.858.000	29.791.594.549	30,51	22,31	5.434.583.244,14
c HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	123.837.542.676,00	63.229.181.808,00	157.964.885.190	72.827.611.744	27,56	15,18	9.598.429.936,00
d LAIN-LAIN PAD YANG SAH	265.290.939.852,44	273.867.452.267,89	224.639.588.129	253.864.013.411,97	(15,32)	(7,30)	(20.003.438.855,92)

2	DANA PERIMBANGAN	1.491.849.894.000,00	1.450.695.264.778,00	2.333.604.004.580	2.583.032.589.905	56,42	78,05	1.132.337.325.127,00
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	643.187.909.100,00	625.310.001.000,00	19.284.510.900	7.120.189.000	(97,00)	(98,86)	(618.189.812.000,00)
	Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	3.555.509.042.478,44	3.448.114.153.634,75	3.802.933.445.799	3.949.896.952.277,97	6,96	14,55	501.782.798.643,22

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp 3.949.896.952.277,97. Realisasi ini meningkat sebesar Rp. 501.782.798.643,22 atau 14,55% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2015 sejumlah Rp 3.448.114.153.634,75. Target pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp. 3.802.933.445.799,00 Target ini meningkat sebesar Rp. 247.424.403.320,56 atau 6,95 % dari target tahun 2015 sebesar Rp. 3.555.509.042.478,44.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.359.744.173.372,97 menurun sebesar Rp 12.364.714.483,78 atau 0,91% dari Realisasi tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.372.108.887.856,75. Adapun Realisasi setiap komponen Pendapat Asli Daerah diuraikan antara lain:

- 1). Pajak Daerah. Realisasi pajak daerah tahun 2016 Rp.1.003,260.953.668 mengalami penurunan sebesar Rp.7,394,288,808.00 atau 0,73% dari Realisasi pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp. 1.010.655.242.476. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).
- 2). Realisasi Retribusi Daerah tahun 2016 Rp. 29.791.594.549 meningkat sebesar Rp. 5.434.583.244,14 atau 22,31% dari Realisasi Retribusi Daerah tahun 2015 sebesar Rp.

24.357.011.304,86. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

- 3). Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2016 Rp.72.827.611.744 meningkat sebesar Rp. 9.598.429.936,00 atau 15,18% dari Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2015 sebesar Rp.63.229.181.808,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
- 4). Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 Rp.253.864.013.411,97 menurun sebesar Rp.20.003.438.855,92 atau 7,30% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 273.867.452.267,89. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Dari Pengembalian dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

b. Dana Perimbangan.

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.583.032.589.905,00 meningkat sebesar Rp. 1.132.337.325.127,00 atau 78,05% dari Realisasi Dana Perimbangan tahun 2015 sebesar Rp.1.450.695.264.778,00. Adapun Pendapatan Dana Perimbangan terdiri antara lain Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.7.120.189.000 menurun sebesar Rp. 618.189.812.000,00 atau 98,86% dari Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2015 sebesar Rp. 625.310.001.000,00. Adapun Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.

Table 3.7

Tabel perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan Target RPJMD Tahun 2018

	SASARAN (JENIS PENDAPATAN)	Satuan	TARGET TH 2016 (Rp.)	REALISASI* TH 2016 (Rp.)	PERBANDINGAN TARGET TH 2016 DENGAN TARGET 2018	CAPAIAN TAHUN 2016 TERHADAP Target Tahun 2018	Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra) (Rp.)
1	2	3	4	5	6=4:8x100%	7=5:8x100%	8
PENDAPATAN DAERAH		(%)	3.802.933.445.799	3.949.896.952.277,97	88,69	92,11	4.287.776.894.000,00
I	PAD	(%)	1.450.044.930.319	1.359.744.173.372,97	82,26	77,13	1.762.840.194.000,00
II	DANA PERIMBANGAN	(%)	2.333.604.004.580	2.583.032.589.905,00	127,71	141,21	1.829.091.365.000,00
III	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	(%)	19.284.510.900	7.120.189.000,00	2,77	1,02	695.845.335.000,00

Sumber Data :Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 dan RPJMD 2013-2018

Perbandingan realisasi pendapatan daerah tahun 2016 dengan target akhir Jangka Menengah 2018 mengalami pencapaian kinerja secara eksponensial, artinya mengalami peningkatan secara konsisten bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp 3.949.896.952.277,97. Realisasi ini mengalami pencapaian 92,11% dari Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sejumlah Rp 4.287.776.894.000,-. Target

pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp. 3.802.933.445.799. Target ini menunjukkan pencapaian positif 88,69% dari Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda).

Perbandingan pendapatan daerah Tahun 2016 dengan 2018 dimaksud terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Adapun kelompok Pendapatan berkenaan diuraikan antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.359.744.173.372,97 mengalami pencapaian realisasi 77,13% dari Target PAD Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sebesar Rp. 1.762.840.194.000,00. Adapun sumber Pendapat PAD terdiri dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan.

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2016 sebesar Rp.2.583.032.589.905 mengalami pencapaian realisasi 141,21% dari Target Dana Perimbangan Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD) sebesar Rp. 1.829.091.365.000,00. Adapun sumber Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.7.120.189.000 mengalami pencapaian 1,02% dari Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD) sebesar Rp. 695.845.335.000,00. Adapun Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Nilai capaian realisasi yang kecil dari komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini disebabkan adanya pemindahan salah satu sumber lain-lain pendapatan yang sah yaitu dana penyesuaian non fisik yang masuk menjadi bagian Dana Alokasi Khusus dalam komponen Dana Perimbangan.

Tabel 3.8

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan
Proyeksi Tahun 2016 dalam RPJMD

No	SASARAN (JENIS PENDAPATAN)	Satuan	TARGET TH 2016 (Rp.)	REALISASI TH 2016 (Rp.)	PERBANDINGAN TARGET TH 2016 Dgn PROYEKSI RPJMD TH 2016	CAPAIAN TAHUN 2016 TERHADAP PROYEKSI TH 2016 DALAM RPJMD	Proyeksi Pendapatan Daerah Th 2016 dalam RPJMD (Rp.)
1	2	3	4	5	6=4:8x100%	7=5:8x100%	8
	PENDAPATAN DAERAH	(%)	3.802.933.445.799	3.949.896.952.277,97	108,05	112,23	3.519.523.835.582,00
I	PAD	(%)	1.450.044.930.319	1.359.744.173.372,97	113,49	106,42	1.277.715.897.000,00
II	DANA PERIMBANGAN	(%)	2.333.604.004.580	2.583.032.589.905,00	140,01	154,98	1.666.729.148.582,00
III	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	(%)	19.284.510.900	7.120.189.000,00	3,35	1,23	575.078.790.000,00

Sumber Data :Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 dan RPJMD 2013-2018

Perbandingan Realisasi pendapatan Daerah tahun 2016 dengan proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 dalam RPJMD mengalami pencapaian 112,23% artinya meningkat sejumlah Rp.430.373.116.695,97 dari proyeksi tahun 2016 dalam RPJMD yang sebesar Rp. 3.519.523.835.582.

Adapun kelompok Pendapatan daerah tersebut diuraikan pencapaiannya antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.359.744.173.372,97 mengalami pencapaian realisasi 106,42% dari proyeksi PAD Tahun 2016 (RPJMD) sebesar Rp. 1.277.715.897.000,00. Meningkat Rp. 82.028.276.372,97,- dari proyeksi PAD tahun 2016 dalam RPJMD.

b. Dana Perimbangan.

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2016 Meningkat Rp. 916.303.441.323,- dari proyeksi Dana Perimbangan tahun 2016 dalam RPJMD. Realisasinya sebesar Rp.2.583.032.589.905 dengan proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2016 dalam RPJMD sebesar Rp.1.666.729.148.582,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.7.120.189.000 mengalami pencapaian 1,23% dari Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 (Proyeksi RPJMD) sebesar Rp. 575.078.790.000,00.

Dari **Tabel 3.8** tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD dan Dana Perimbangan tahun 2016 telah **melampaui** proyeksi PAD dan Dana Perimbangan tahun 2016 dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018. Adapun masih kecilnya realisasi dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah dijelaskan dalam penjelasan tabel 3.7 sebelumnya, namun secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 telah melampaui proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2016 yang terdapat dalam RPJMD Provinsi NTB.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja, Alternatif Dan Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah, perbandingan antara capaian kinerja dengan beberapa kinerja yang ditargetkan masih ditemui adanya gap-gap antara capaian dan target. Kesenjangan ini sesungguhnya adalah isu dan masalah yang harus dipecahkan pada masa mendatang.

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tabel dan beberapa analisis uraian di atas antara lain:

- a. Relatif rendahnya pendanaan untuk mendukung sarana penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi belum optimal.
- c. Sarana dan prasarana pendukung aset daerah (sumber penerimaan retribusi) masih belum memadai.
- d. Standar Kompetensi Aparatur/Pegawai, serta kuantitas (jumlah) yang mampu mendukung pekerjaan teknis operasional pengelolaan PAD sesuai dengan TUPOKSI masing-masing masih belum tersedia secara memadai.
- e. WP masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban Perpajakannya, yang dapat dilihat dari masih terdapatnya sebagian WP yg tidak atau terlambat melakukan daftar ulang (TMDU).
- f. Kondisi perkembangan sosial & ekonomi serta keamanan khususnya di Provinsi NTB yang berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan WP yang berimplikasi pada tingkat Pendapatan PAD.
- g. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan.
- h. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif.
- i. Kebijakan Otonomi Daerah Belum Sepenuhnya Didukung Oleh Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- j. Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- k. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagaimana untuk mengatasi Permasalahan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan analisa sumber-sumber retribusi dan pajak daerah.
- b. Mengupayakan secara bertahap ketersediaan sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Penerapan *reward* and *punishment* bagi petugas dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Pusat.
- e. Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Optimalisasi / Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD.

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB dalam rangka peningkatan PAD antara lain :

- a. Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Samsat Online Pajak Daerah.
- b. Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
- c. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah .
- d. Melaksanakan rapat koordinasi /evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
- e. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan Instansi terkait.
- f. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- g. Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib pajak/masyarakat melalui Media Elektronik dan media lainnya.
- h. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB Dipenda telah menambah unit pelayanan dengan sistem Drive Thru untuk pengesahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 telah diresmikan dan

beroperasinya pelayanan Drive Thru tambahan yang berlokasi di Gunung Sari Lombok Barat dan di Paok Motong Lombok Timur.

Dari beberapa paparan di atas, dalam upaya mencapai tujuannya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif, yaitu :

- a. Melakukan penyempurnaan pelayanan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dari manual ke sistem komputerisasi (online) di seluruh UPTD PPDRD se-NTB
- b. Melakukan Samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang jauh dari lokasi samsat.
- c. Penambahan jam pelayanan untuk Wajib Pajak yang bekerja pada jam sibuk.
- d. Penambahan jam pelayanan pada Samsat *weekend* yang kini tidak hanya melayani Wajib Pajak saat akhir pekan melainkan setiap hari kerja dari pukul 17.00 sampai dengan 21.00 wita.
- e. Mendirikan Samsat *corner* di Lombok Epicentrum Mall yang melayani wajib pajak 7 (tujuh) hari seminggu dari pukul 10.00 sampai dengan 21.00 wita.
- f. Melakukan sosialisasi pungutan pajak Kendaraan bermotor bekerjasama dengan Pemda kab/Kota.
- g. Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Pajak, Kanwil Perbendaharaan dengan Pemda kab/Kota se NTB berkaitan dengan PBB dan BPHTB

Dalam implementasi terobosan inovatif diatas, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB selaku eksekutor kebijakan pengelolaan pendapatan daerah banyak menemui permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah
- b. Belum validnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama.
- c. Adanya Sengketa pajak dengan WP (pihak PT. Newmont NNT).

- d. Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Masih rendahnya SDM yang menguasai teknologi program komputer *online*.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas, beberapa langkah telah diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu.
- b. Memberikan reward kepada Wajib Pajak yang rajin membayar pajak dalam beberapa katagori.
- c. Melaksanakan peremajaan/pemutahiran data kendaraan bermotor.
- d. Membentuk tim advokasi yg terdiri dari unsur Dispenda, Biro Hukum dan Pengacara dlm upaya menangani sengketa Pajak dg PT. NNT di Pengadilan Pajak
- e. Memenuhi beberapa sarana dan prasarana yang menjadi prioritas peningkatan pelayanan.
- f. Memberikan kesempatan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Langkah rekomendasi yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pembenahan / upgrade program On Line System antar Samsat se NTB.
- b. Pengawasan, penerapan pelayanan dengan sistem FIFO (First In First Out) yang pertama masuk dan pertama keluar dengan waktu yang cepat dan tepat.
- c. Memberikan keringanan kepada wajib pajak, khususnya wajib BBNKB melalui Pergub No.11 tahun 2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- d. melaksanakan pemutahiran data obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang valid.
- e. Meningkatkan frekwensi OPGAB dalam rangka menjangir kendaraan luar daerah yang beroperasi diwilayah NTB lebih dari 3 bulan secara berturut-turut.
- f. Meningkatkan Etos dan budaya kerja dengan meningkatkan capacity building pegawai.
- g. Melakukan pembahasan terhadap Raperda Retribusi dengan pihak legislatif.

6. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan

a. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan.

Efisiensi anggaran pendapatan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima/ yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait efisiensi anggaran dibuat kategori atas beberapa nilai dari perhitungan rasio efisiensi.

Jika rasio efisiensi < 10% maka dinilai sangat efisien, jika rasio efisiensi antara 10%-20% maka dinilai efisien, jika rasio efisiensi antara 21%-30% maka dinilai cukup efisien, jika rasio efisiensi antara 31%-40% maka dinilai kurang efisien dan jika rasio efisiensi > 40% maka dinilai tidak efisien.

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini:

Table 3.9
Tabel Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah

Tahun 2016 Triwulan I s/d IV	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Hasil Analisis Efisiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
a	b	c	d	e=c:d x 100	f
Total Anggaran Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	81.012.694.000,00	69.245.315.875,00	3.949.896.952.277,97	1,75	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan I	16.688.685.644,00	10.786.586.341,00	592.484.542.841,70	1,82	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan II	23.570.865.547,28	17.279.513.938,00	789.979.390.455,59	2,19	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan III	20.671.896.965,72	13.783.229.098,00	1.184.969.085.683,39	1,16	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan IV	20.081.245.843,00	27.395.986.498,00	1.382.463.933.297,29	1,98	Sangat efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Asli Daerah	81.012.694.000,00	69.245.315.875,00	1.359.744.173.372,97	5,09	Sangat efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak Daerah	81.012.694.000,00	69.245.315.875,00	1.003.260.953.668,00	6,90	Sangat efisien

Sumber data: Hasil Pengumpulan data kinerja tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2016, triwulan I s/d triwulan IV.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Rasio efisiensi anggaran pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I tahun 2016 **1,82% (Sangat Efisien)** mengalami kenaikan rasio sebesar 0,37% Pada triwulan II Tahun Anggaran 2016 menjadi **2,19% (Sangat Efisien)**.

Rasio efisiensi anggaran pendapatan Pada triwulan III Tahun Anggaran 2016 sebesar **1,16% (Sangat Efisien)** menunjukkan adanya efisiensi anggaran dari triwulan sebelumnya, sedangkan Pada triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebesar **1,98% (Sangat Efisien)** kembali mengalami kenaikan penggunaan anggaran hingga **0,82%** dibandingkan dengan rasio efisiensi anggaran pendapatan Pada Tahun Anggaran 2016 triwulan III.

Rasio efisiensi anggaran pendapatan Dinas Pendapatan Daerah selama tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar **5,09%**

(Sangat Efisien) yang berarti Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai **Sangat Efisien** dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, begitu pula Rasio efisiensi anggaran terhadap perolehan pendapatan pajak daerah sebesar **6,90%** (Sangat Efisien). Adapun Jenis Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dimaksud terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok serta adanya pemungutan denda pajak yang masuk kedalam komponen Lain-lain PAD yang Sah.

b. Analisis Efektivitas Pendapatan.

Efektivitas kinerja Pendapatan yang dapat ditunjukkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggambarkan kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikategorikan atas beberapa nilai hasil perhitungan rasio efektivitas.

Jika rasio efektivitas $> 100\%$ maka dinilai sangat efektif, jika rasio efektivitas 100% maka dinilai efektif, jika rasio efektivitas antara $90\%-99\%$ maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektivitas antara $75\%-89\%$ maka dinilai kurang efektif dan jika rasio efektivitas $< 75\%$ maka dinilai tidak efektif.

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik. Perhitungan efektivitas pendapatan pada table berikut ini :

Tabel 3.10
Tabel Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	Rasio Efektivitas (%)	Hasil Analisis Efektivitas
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	3.802.933.445.799,00	3.949.896.952.277,97	103,86	Sangat efektif
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.450.044.930.319,00	1.359.744.173.372,97	93,77	Cukup efektif
a) PAJAK DAERAH	1.037.549.599.000,00	1.003.260.953.668,00	96,70	Cukup efektif
b) RETRIBUSI DAERAH	29.890.858.000,00	29.791.594.549,00	99,67	Cukup efektif
c) HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	157.964.885.190,00	72.827.611.744,00	46,10	Tidak efektif
d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	224.639.588.129,00	253.864.013.411,97	113,01	Sangat efektif
2 DANA PERIMBANGAN	2.333.604.004.580,00	2.583.032.589.905,00	110,69	Sangat efektif
3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.284.510.900,00	7.120.189.000,00	36,92	Tidak efektif
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	3.802.933.445.799,00	3.949.896.952.277,97	103,86	Sangat efektif

Sumber Data : Laporan Realisasi Pendapatan **Sementara** Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016

Dari Tabel di atas diketahui, bahwa rasio efektivitas pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 adalah 103,86 % yang berarti Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi **Sangat efektif**. Hal ini disebabkan karena total prosentase realisasi anggaran pendapatan Daerah berada pada rasio efektifitas > 100% yang artinya sangat efektif dalam pencapaian target anggaran pendapatan Daerah yang ditetapkan. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 dimaksud terdiri atas Rasio efektivitas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) 93,77 %, Dana Perimbangan 110,69 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 36,92 %.

Pada tahun 2016 rasio efektivitas rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari jenis Pendapatan:

- Pajak Daerah dengan Rasio Efektivitas 96,70% atau dalam kategori cukup efektif. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan Pajak Daerah lebih kecil dari target pendapatan Pajak Daerah karena berkurangnya penerimaan pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
- Retribusi Daerah Rasio Efektivitasnya 99,67% atau dalam kategori cukup efektif. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan Retribusi

Daerah lebih kecil dari target pendapatan Retribusi Daerah terutama pada bagian retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rasio Efektivitasnya 46,10 % atau dalam kategori Tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rasio Efektivitasnya 113,01 % atau dalam kategori sangat efektif.

Rasio Efektivitas dengan kategori capaian tidak efektif dari jenis pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal pada pengelola pendapatan tersebut.

7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
	Penyediaan jasa keamanan kantor
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Pembangunan gedung kantor
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	Pengadaan meubelair
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan pelatihan formal
	Pembinaan mental dan fisik aparatur
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah
	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor
	Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
	Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL
	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL
	Aplikasi Retribusi dan PPL
7	Program Reformasi Birokrasi
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
8	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Dari total anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Tahun 2016 yaitu Rp. 81.012.694.000,- tidak dapat direalisasikan 100%. Realisasi keuangan Tahun 2016 pada Dinas Pendapatan diuraikan sebagai berikut :

DINAS PENDAPATAN DAERAH		
Target	:	81.012.694.000,00
Realisasi	:	69.245.315.875,00
Efisiensi Anggaran	:	11.767.378.125,00
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG		
Target	:	49.267.291.770,00
Realisasi	:	40.846.560.612,00

Efisiensi Anggaran	:	8.420.731.158,00
2. BELANJA LANGSUNG		
Target	:	31.745.402.230,00
Realisasi	:	28.398.755.263,00
Efisiensi Anggaran	:	3.346.646.967,00

Sebaran alokasi dana pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Table 3.11
Tabel Realisasi Anggaran UPTD PPDRD se-NTB

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
1.	Induk	61.226.090.995	50.692.753.331	82,80	10.533.337.664
2.	Mataram	2.825.535.630	2.471.769.002	87,48	353.766.628
3.	Gerung	2.586.565.725	2.502.107.045	96,73	84.458.680
4.	Praya	2.262.732.050	2.179.242.546	96,31	83.489.504
5.	Tanjung	1.683.677.100	1.567.193.956	93,08	116.483.144
6.	Selong	2.348.175.650	2.116.084.876	90,12	232.090.774
7.	Sumbawa Barat	2.024.106.810	1.930.728.746	95,39	93.378.064
8.	Sumbawa	2.027.683.320	1.965.934.532	96,95	61.748.788
9.	Dompu	1.618.204.600	1.537.538.027	95,02	80.666.573
10.	Bima	2.409.922.120	2.281.963.814	99,42	127.958.306
Jumlah		81.012.694.000	69.245.315.875	85,47	11.767.378.125

Sumber Data :Laporan Realisasi Keuangan Dipenda Provinsi NTB TA 2016

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp.81.012.694.000,- realisasinya sebesar Rp. 69.245.315.875,- atau sekitar **85,47%**. Realisasi keuangan untuk masing – masing kegiatan diuraikan antara lain:

Tabel 3.12
Tabel Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Per-Program Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
	DINAS PENDAPATAN DAERAH	81.012.694.000,00	69.245.315.875,00	85,47	11.767.378.125,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.267.291.770,00	40.846.560.612,00	82,91	8.420.731.158,00
	BELANJA LANGSUNG	31.745.402.230,00	28.398.755.263,00	89,46	3.346.646.967,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.441.000.962,00	12.118.986.602,00	90,16	1.322.014.360,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	87.437.400,00	83.581.725,00	95,59	3.855.675,00
	Penyediaan jasa		1.770.405.512,00	85,13	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
	komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.079.564.260,00			309.158.748,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	584.986.000,00	549.901.000,00	94,00	34.085.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.854.557.500,00	1.851.264.110,00	99,82	3.293.390,00
	Penyediaan alat tulis kantor	551.260.000,00	548.342.225,00	99,47	2.917.775,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.495.370.000,00	1.038.583.100,00	69,45	476.786.900,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	77.853.900,00	77.248.600,00	99,22	605.300,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.435.360.000,00	4.031.537.560,00	90,90	403.822.440,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	66.424.000,00	62.505.500,00	94,10	3.918.500,00
	Penyediaan makanan dan minuman	326.850.000,00	286.090.830,00	87,53	40.759.170,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	540.789.002,00	517.158.090,00	95,63	23.630.912,00
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	387.900.000,00	386.500.000,00	99,64	1.400.000,00
	Penyediaan jasa keamanan kantor	952.648.900,00	915.868.350,00	99,80	36.780.550,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.435.931.237,00	7.790.884.893,00	92,35	645.046.344,00
	Pembangunan gedung kantor	3.448.115.237,00	3.278.405.643,00	95,08	169.709.594,00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	946.200.000,00	885.820.250,00	93,62	60.379.750,00
	Pengadaan meubelair	1.147.795.700,00	977.904.000,00	85,20	169.891.700,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.230.122.200,00	1.170.381.400,00	95,14	59.740.800,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.091.698.100,00	949.354.457,00	86,96	142.343.643,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	221.400.000,00	196.180.992,00	88,61	25.219.008,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	350.600.000,00	332.838.151,00	94,93	17.761.849,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206.085.000,00	151.372.900,00	73,45	54.712.100,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	141.785.000,00	101.122.900,00	71,32	40.662.100,00
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	64.300.000,00	50.250.000,00	78,15	14.050.000,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	261.417.000,00	240.334.780,00	91,94	21.082.220,00
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	94.850.000,00	91.000.000,00	63,14	3.850.000,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	70.150.000,00	67.886.780,00	97,06	2.263.220,00
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	96.417.000,00	81.448.000,00	84,47	14.969.000,00
5	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	362.940.000,00	306.279.500,00	84,39	56.660.500,00
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	362.940.000,00	306.279.500,00	84,39	56.660.500,00
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.733.768.031,00	7.494.093.561,00	85,81	1.239.674.470,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	341.659.500,00	240.765.700,00	70,47	100.893.800,00
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	4.906.840.351,00	4.040.201.929,00	82,34	866.638.422,00
	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	771.910.000,00	696.309.192,00	90,21	75.600.000,00
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	1.780.640.000,00	1.691.775.000,00	95,01	88.865.000,00
	Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	311.617.380,00	303.313.100,00	97,34	8.304.280,00
	Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait	235.977.700,00	191.876.840,00	81,31	44.100.860,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	52.320.000,00	44.978.000,00	85,97	7.342.000,00
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	75.100.000,00	49.292.100,00	65,64	25.807.900,00
	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	182.483.100,00	163.516.700,00	89,61	18.966.400,00
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	50.110.000,00	48.815.000,00	97,42	1.295.000,00
	Aplikasi Retribusi dan PPL	25.110.000,00	23.250.000,00	92,59	1.860.000,00
7	Program Reformasi Birokrasi	253.860.000,00	253.823.027,00	99,99	36.973,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	253.860.000,00	253.823.027,00	99,99	36.973,00
8	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	50.400.000,00	42.980.000,00	85,28	7.420.000,00
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	50.400.000,00	42.980.000,00	85,28	7.420.000,00

Sumber Data :Laporan Realisasi Keuangan Dipenda Provinsi NTB TA 2016

1. Metode Pengukuran Kinerja Beserta Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi *)}}{\text{Rencana **)}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana** - (Realisasi * - Rencana**)}}{\text{Rencana **)}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Pengukuran Sekala Ordinal	Uraian Capaian Kinerja
1.	85 s.d 100	: Sangat Berhasil
2.	70 ≤ s.d < 85	: Berhasil
3.	55 ≤ s.d < 70	: Cukup Berhasil
4.	< 55	: Tidak berhasil

Hasil pengukuran kinerja, diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan metode pengukuran kinerja dan baru dapat

dihitung setelah berakhirnya suatu kegiatan dilaksanakan dengan indikator kinerja yang terdiri dari indicator inputs, outputs, dan outcomes, dengan melihat manfaat dan dampak terhadap kehidupan sosial dari berbagai aspek.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan metode pengukuran tingkat capaian indikator kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Tabel Capaian Program

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	Nilai Capaian %	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,16	Sangat Berhasil
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,35	Sangat Berhasil
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	73,45	Berhasil
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91,94	Sangat Berhasil
5.	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	84,39	Berhasil
6.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	85,81	Sangat Berhasil
7.	Program Reformasi Birokrasi	99,99	Sangat Berhasil
8.	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	85,28	Sangat Berhasil

Sumber Data :Laporan Realisasi Keuangan Dipenda Provinsi NTB TA 2016

Dari delapan sasaran yang dilakukan pengukuran kinerjanya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut dalam table di bawah ini:

Tabel 3.14

Tabel Jumlah Nilai Capaian

No.	Nama Klasifikasi Capaian	Jumlah Klasifikasi Capaian Sasaran Setrategis/Program	Jumlah Nilai Capaian (%)
1.	Sangat Berhasil	6	545,53
2.	Berhasil	2	157,84
3.	Cukup Berhasil	0	
4.	Tidak Berhasil	0	
J u m l a h		8	703,37

Hasil pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode pengukuran kinerja seperti terlampir. Tingkat capaian indikator kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dari 8 (delapan) Program yang dilaksanakan 6 (enam) Program dinyatakan *Sangat Berhasil*, 2 (dua) Program dinyatakan *Berhasil* dan tidak ada Program dinyatakan *Cukup Berhasil ataupun* Program yang dinyatakan *tidak berhasil*, Sehingga hasil dari pengukuran kinerja kegiatan selama tahun 2016 adalah :

$$= 703,37 \% : 8 = 87,92\% \text{ (Sangat Berhasil).}$$

Berdasarkan hasil perhitungan **87,92 %** ini juga dapat diketahui Efisiensi Belanja dengan menggunakan rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan belanja dengan anggaran belanja. Belanja mencapai efisien apabila rasio efisiensi < 100 %. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penghematan anggaran belanja akan semakin baik.

Singkatnya pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah efisien menggunakan anggaran belanja, terlihat dari hasil rasio efisiensi di tahun 2016 adalah **87,92%**, dihubungkan dengan persentase tersebut berarti Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 dapat dinilai bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.

2. Uraian Capaian Masing-Masing Program Dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Penyediaan jasa surat menyurat Dengan jumlah dana sebesar Rp. 87.437.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 83.581.725,00 atau 95.59 %.*

 Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat

 Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan surat

– menyurat

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya kemudahan pelayanan surat – menyurat

✚ Indikator Impact adalah Terwujudnya Tertib pelayanan surat menyurat

2). *Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.079.564.260,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.770.405.512,00 atau 85,13%*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air bersih dan penerangan kantor

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya komunikasi untuk kelancaran tugas

✚ Indikator Benefit adalah terwujudnya koordinasi dinas pendapatan dengan instansi terkait

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya pendapatan asli daerah

3). *Penyediaan jasa administrasi keuangan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 584.986.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 549.901.000,00 atau 94.00 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya tertib administrasi keuangan

✚ Indikator Benefit adalah Terlaksananya administrasi keuangan

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya tertib administrasi keuangan

4). *Penyediaan jasa kebersihan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.854.557.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.851.264.110,00 atau 99.82 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya administrasi

perkantoran

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebersihan kantor

✚ Indikator Benefit adalah Pelaksanaan kebersihan tercapai

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya kebersihan kantor

5). *Penyediaan alat tulis kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 551.260.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 548.342.225,00 atau 99,47 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan aparatur

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan aparatur

✚ Indikator Benefit adalah Pelaksanaan kegiatan lancar

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya tertib administrasi pelayanan aparatur

6). *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.495.370.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.1.038.583.100,00 atau 69.45 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan administrasi

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya pelayanan administrasi

7). *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 77.853.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 77.248.600,00 atau 99,22 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi

✚ Indikator Outcome adalah Terciptanya kenyamanan bekerja

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan

administrasi

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya pelayanan administrasi

8). *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.435.360.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.031.537.560,00 atau 90,90 %.*

✚ Indikator Output adalah Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor

✚ Indikator Outcome adalah Terciptanya fasilitas kantor

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya sarana kerja yang efektif

✚ Indikator Impact adalah Suasana kerja yang nyaman

9). *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 66.424.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 62.505.500,00 atau 94,10 %*

✚ Indikator Output adalah Buku, majalah literatur / referensi peraturan Per Undang – undangan

✚ Indikator Outcome adalah Meningkatnya pengetahuan tentang informasi dan peraturan Perundang – undangan

✚ Indikator Benefit adalah Memperluas wawasan dan mengetahui peraturan per Undang - undangan terutama masalah keuangan

✚ Indikator Impact adalah Dengan memahami aturan perundang - undangan yang dinamis terwujudlah peningkatan PAD

10). *Penyediaan makanan dan minuman Dengan jumlah dana sebesar Rp. 326.850.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 286.090.830,00 atau 87,53 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya penyediaan makan dan minum

✚ Indikator Outcome adalah Pelaksanaan kegiatan berjalan baik

Indikator Benefit adalah Meningkatnya hasil rapat secara optimal

Indikator Impact adalah Koordinasi dapat berjalan lancar

11). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 540.789.002,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 517.158.090,00 atau 95.63 %.*

Indikator Output adalah Terciptanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lainnya

Indikator Outcome adalah Terlaksananya kerjasama yang baik antara Pemda, Pemerintah Pusat dan provinsi lainnya

Indikator Benefit adalah Meningkatnya hubungan kerjasama antara Pemda, Pusat dan provinsi lainnya

Indikator Impact adalah Meningkatnya Pendapatan Daerah

12). *Penyediaan jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Dengan jumlah dana sebesar Rp. 387.900.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 386.500.000,00 atau 99,64 %.*

Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kesejahteraan aparatur

Indikator Benefit adalah Terlaksananya pelayanan administrasi

Indikator Impact adalah Meningkatnya tertib administrasi

13). *Penyediaan jasa keamanan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 952.648.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 915.868.350,00 atau 96,14 %.*

Indikator Output adalah Terlaksananya keamanan kantor

Indikator Outcome adalah Meningkatnya keamanan kantor

Indikator Benefit adalah Tertibnya suasana keamanan kantor

Indikator Impact adalah Terwujudnya keamanan kantor

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pembangunan gedung kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.448.115.237,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.278.405.643,00 atau 95,08 %.*

Indikator Output adalah Terwujudnya gedung kantor yang baru

Indikator Outcome adalah Terlaksana gedung kantor baru untuk pelaksanaan kerja yang baik

Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketentraman kerja dan pelayanan

Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

2). *Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Dengan jumlah dana sebesar Rp. 946.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 885.820.250,00 atau 93,62 %.*

Indikator Output adalah Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Indikator Outcome adalah Terlaksana Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Indikator Benefit adalah Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Indikator Impact adalah Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

3). *Pengadaan Meubelair, Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.147.795.700,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 977.904.000,00 atau 85.20 %*

Indikator Output adalah Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor

Indikator Outcome adalah Terpeliharanya perlengkapan kantor

- ✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketentraman kerja dan pelayanan
 - ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD
- 4). *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.230.122.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.170.381.400,00 atau 95,14 % .*
- ✚ Indikator Output adalah Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
 - ✚ Indikator Outcome adalah Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
 - ✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketentraman kerja
 - ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD
- 5). *Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.091.698.100,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 949.354.457,00 atau 86,96 %.*
- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan aparatur
 - ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya pelayanan aparatur
 - ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya disiplin aparatur
 - ✚ Indikator Impact adalah Terpeliharanya kendaraan dinas / kantor
- 6). *Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 221.400.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 196.180.992,00 atau 88,61 %*
- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya kegiatan aparatur
 - ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan aparatur
 - ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan aparatur
 - ✚ Indikator Impact adalah Tertibnya pelayanan aparatur

7). *Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 350.600.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 322.838.151,00 atau 94,93 %.*

✚ Indikator Output adalah Terwujudnya pemeliharaan kantor dan perlengkapannya

✚ Indikator Outcome adalah Terpeliharanya gedung kantor dan perlengkapan kantor

✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketenangan kerja

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pendidikan dan pelatihan formal Dengan jumlah dana sebesar Rp. 141.785.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 101.122.900,00 atau 71.32 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya diklat aparatur

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kemampuan SDM

✚ Indikator Benefit adalah Bertambahnya wawasan aparatur

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya kemampuan aparatur

2). *Pembinaan mental dan fisik aparatur Dengan jumlah dana sebesar Rp. 64.300.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.250.000,00 atau 78,15 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*

✚ Indikator Benefit adalah Bertambahnya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1). Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dengan jumlah dana sebesar Rp. 94.850.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 91.000.000,00 atau 95,94 %.

✚ Indikator Output adalah Tersusunnya Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2). Penyusunan *pelaporan keuangan akhir tahun* Dengan jumlah dana sebesar Rp. 70.150.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 67.886.780,00 atau 96,77 %.

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya laporan keuangan

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan keuangan

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya administrasi keuangan

3). Penyusunan *Rencana Kerja SKPD* Dengan jumlah dana sebesar Rp. 96.417.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 81.448.000,00 atau 84,47 %.

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya *Penyusunan*

Rencana Kerja SKPD

- ✚ Indikator Impact adalah Tertibnya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan *Manajemen* Asset/Barang Milik Daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 362.940.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 306.279.500,00 atau 84,39 %.

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Manajemen* Asset/Barang Milik Daerah
- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya Asset/Barang Milik Daerah
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya Asset/Barang Milik Daerah
- ✚ Indikator Impact adalah Tertibnya Asset/Barang Milik Daerah

f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Dengan jumlah dana sebesar Rp. 341.659.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 240.765.700,00 atau 70,47 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya susunan rencana Peraturan Daerah tentang pajak daerah & retribusi daerah
- ✚ Indikator Outcome adalah Terwujudnya rencana peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- ✚ Indikator Benefit adalah Tersedianya payung hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4 perda
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya PAD NTB

- 2). *intensifikasi penerimaan pajak daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.906.840.351,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.040.201.929,00 atau 82,34 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya koordinasi dan

intensifikasi obyek retribusi daerah

- ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data obyek retribusi daerah
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya penerimaan retribusi daerah
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan APBD untuk pelaksanaan pembangunan daerah

3). *Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 771.910.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 696.309.192,00 atau 90,21 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya program on line keSAMSATAN
- ✚ Indikator Outcome adalah Meningkatnya administrasi perpajakan
- ✚ Indikator Benefit adalah Terlaksananya penerimaan pajak daerah sesuai target
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

4). *Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.780.640.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.691.775.000,00 atau 95,01 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terinventarisasinya data kendaraan bermotor yang akurat
- ✚ Indikator Outcome adalah Tertibnya administrasi pungutan pajak kendaraan bermotor
- ✚ Indikator Benefit adalah Terjaringnya kendaraan bermotor belum memenuhi kewajiban
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

5). *Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 311.617.380,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 303.313.100,00 atau 97,34 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya konsultasi,

penyuluhan dan koordinasi

- ✚ Indikator Outcome adalah Laporan penerimaan hasil penyuluhan dan koordinasi

- ✚ Indikator Benefit adalah Koordinasi Dana perimbangan meningkat

- ✚ Indikator Impact adalah Penerimaan APBD meningkat

6). *Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait Dengan jumlah dana sebesar Rp. 235.977.700,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 191.876.840,00 atau 81,31 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Dipenda NTB dengan instansi terkait

- ✚ Indikator Outcome adalah Tersusunnya laporan perubahan dan penetapan target pendapatan daerah

- ✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kesepakatan antar dinas terkait untuk memperoleh target pendapatan

- ✚ Indikator Impact adalah Peningkatan PAD

7). *Koordinasi dan Sinkrinisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL Dengan jumlah dana sebesar Rp. 52.320.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.978.000,00 atau 85,97 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkrinisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL.

- ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya Data Koordinasi dan Sinkrinisasi Penerimaan Retribusi dan PPL

- ✚ Indikator Benefit adalah meningkatnya Penerimaan Retribusi dan PPL

- ✚ Indikator Impact adalah terselenggaranya Penerimaan Retribusi dan PPL

8). *Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL Dengan jumlah dana sebesar Rp. 75.100.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 49.292.100,00 atau 65,64%*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya penyusunan realisasi penerimaan & evaluasi administrasi pemungutan retribusi & PLL

✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data realisasi penerimaan dan evaluasi administrasi pemungutan retribusi & PLL

✚ Indikator Benefit adalah Penerimaan retribusi dan PLL meningkat

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

9). *Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya Dengan jumlah dana sebesar Rp. 182.483.100,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 163.516.700,00 atau 89,61 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya.*

✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data *obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya.*

✚ Indikator Benefit adalah *pertambahan obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya.*

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor *Retribusi dan Pendapatan Lainnya*

10). *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL Dengan jumlah dana sebesar Rp 50.110.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 48.815.000,00 atau 97,42 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL.*

✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL.*

✚ Indikator Benefit adalah *bertambahnya kemudahan Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL.*

✚ Indikator Impact adalah berkurangnya *tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL* serta Meningkatnya

penerimaan PAD.

- ✚ Indikator Impact *adalah* berkurangnya *tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL* serta Meningkatkan penerimaan PAD.

11). Aplikasi *Retribusi dan PPL Dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.110.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.250.000,00 atau 92,59 %*

g. Program Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian Dengan jumlah dana sebesar Rp 253.860.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 253.823.027,00 atau 99,99 %.

- ✚ Indikator Output *adalah* Terlaksananya *Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian.*
- ✚ Indikator Outcome *adalah* Tersedianya data *Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian*
- ✚ Indik Benefit *adalah* meningkatnya disiplin PNS lingkup Dipenda Prov NTB.
- ✚ Indikator Impact *adalah* terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas aparatur Dipenda berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

h. Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Management Asset/barang Daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.400.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 42.980.000,00 atau 85,28 %

- ✚ Indikator Output *adalah* Terlaksananya *Peningkatan Management Asset/barang Daerah.*
- ✚ Indikator Outcome *adalah* Tersedianya data *Peningkatan Management Asset/barang Daerah.*
- ✚ Indik Benefit *adalah* meningkatnya tertib administrasi dan

pengetahuan aparaturnya dalam *Management Asset/barang Daerah*.

- Indikator Impact adalah berkurangnya kesalahan *pengelolaan Management Asset/barang Daerah*.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas, merupakan wujud nyata dari peningkatan kinerja aparat Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pengelola pajak daerah telah menjalankan fungsinya selaku koordinator bidang pendapatan daerah yang didukung sarana dan prasarana yang baik, intensitas pengelolaan pendapatan daerah seluruh unsur yang terkait disertai dengan peningkatan koordinasi semua pihak.

Pencapaian kinerja keuangan tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan Penerimaan dari jenis **pendapatan Pajak daerah** yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat **telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 73,78%**, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 2,19%. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 5,36% (dalam urutan ketiga) setelah jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 18,67%.

Berdasarkan hasil kinerja ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus berupaya untuk senantiasa memperhatikan bagaimana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akan dibuat sehingga dapat dinilai efektif dan efisien serta dapat digunakan untuk evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja periode berikutnya dalam rangka mempermudah proses manajerial guna pengambilan keputusan berupa kebijakan-kebijakan mana yang seperlunya akan diambil.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 323 personil telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada tahun 2016 pendapatan daerah dapat terealisasi sebesar Rp.3.949.896.952.277,97 yakni 103,86% dari target pendapatan daerah sebesar Rp.3.802.933.445.799,00.
2. Terhadap **Proyeksi Pendapatan Asli Daerah** Tahun 2016 dalam RPJMD, Pencapaian realisasi PAD pada tahun 2016 **melampaui** 106,42% dengan realisasi PAD sebesar Rp. 1.359.744.173.372,97 dari proyeksi PAD Tahun 2016 (RPJMD) sebesar Rp. 1.277.715.897.000,00.
3. Perhitungan Rasio efisiensi anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah **6.90%**, yang menunjukkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat **Sangat Efisien** dalam pengelolaan anggaran pendapatannya.
4. Rasio efektivitas pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 adalah 103,87 % yang berarti Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi **Sangat efektif**.
5. Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016, hasil dari pengukuran kinerja kegiatan tahun 2016 adalah = **703,37 % : 8 = 87,92 % %** atau dalam kategori **Sangat Berhasil**.

B. Langkah-Langkah Dimasa Depan.

Langkah penting yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2016 lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan berbagai inovasi dan perbaikan-perbaikan pada bidang pelayanan, sebagaimana telah ditempuh melalui pelayanan kendaraan operasional samsat keliling, samsat *weekend*, samsat *Corner*, samsat *drive thru* dan samsat *Agent* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan menekan biaya ekonomi wajib pajak dalam pengesahan STNK setiap tahun yang dilaksanakan secara *ONLINE* pada seluruh UPTD PPDRD se-NTB. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB juga memberikan akses informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan membentuk CSO (*Customer Service Officer*) diseluruh samsat UPTD PPDRD se-NTB. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah didukung oleh personil sebanyak 323 PNS yang terbagi pada kantor induk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB beserta UPTD PPDRD se-NTB. Upaya-upaya pelayanan ini tentunya dikemudian hari akan semakin ditingkatkan dan dikembangkan.
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar terdorong dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditempuh melalui Kegiatan baik yang bersifat represif maupun yang bersifat prefentif. kegiatan yang bersifat prefentif dimaksud melalui Sosialisasi Pajak Daerah dengan penyebar luasan ribuan lembar leaflet, mengadakan acara Gebyar Pajak dan lain-lain. Sedangkan kegiatan yang bersifat represif ditempuh melalui operasi penertiban kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada seluruh kantor Samsat UPTD-PPDRD se-NTB.
3. Mengoptimalkan kerjasama dalam upaya menjaga keseimbangan

4. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur serta melakukan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dan peningkatan Pelayanan Masyarakat khususnya terhadap wajib Pajak Daerah.

Akhir kata, seyogianya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada segenap pihak (*stakeholders*) dan sejatinya dapat menjadi informasi dalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Mataram, Januari 2017

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H. Iswandi, M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sistem pelayanan PAD	1. Pertumbuhan PAD	15,06%
2.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	2. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui : a. Samsat keliling b. Drive Thru dan Samsat Pembantu c. Samsat Week-end 3. Buku NJKB sebagai pedoman penetapan tarif PKB dan BBNKB yang disusun 4. Laporan Monev dan koordinasi/Konsultasi pelaksanaan pungutan Pajak Daerah 5. Rapat Koordinasi Pembina samsat 6. Monitoring Cukai Rokok Ilegal 7. Penyelesaian Sengketa Pajak 8. Sistem Online keSamsatan 9. Operasi Gabungan	10 Unit 10 Unit 1 Unit 1 dokumen 12 Laporan 1 Laporan 10 Pasar 1 kasus 1 Sistem 856 kali
3.	Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	10. Revisi Perda Retribusi Daerah 11. Dokumen evaluasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	1 Perda 2 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan	12. Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	12 Dokumen
5.	Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD	13. Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	2 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 7.089.256.780,00	Sumber dana : APBD Mendukung sasaran strategis No. 1 indikator kinerja No.1 ; Sasaran strategis 2 indikator kinerja No 2,3,4,5,6,7,8,9; Sasaran strategis 3 indikator kinerja No 10,11; Sasaran strategis No 4 indikator kinerja No. 12 ; Sasaran strategis 5 indikator kinerja No. 13 dan indikator kinerja RPJMD No.10

Mataram , 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610915 199303 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sistem pelayanan PAD	1. Pertumbuhan PAD	15,06%
2.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	2. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui : a. Samsat keliling b. Drive Thru dan Samsat Pembantu c. Samsat Week-end 3. Buku NJKB sebagai pedoman penetapan tarif PKB dan BBNKB yang disusun 4. Laporan Monev dan koordinasi/Konsultasi pelaksanaan pungutan Pajak Daerah 5. Rapat Koordinasi Pembina samsat 6. Monitoring Cukai Rokok Ilegal 7. Penyelesaian Sengketa Pajak 8. Sistem Online keSamsatan 9. Operasi Gabungan	10 Unit 10 Unit 1 Unit 1 dokumen 12 Laporan 1 Laporan 10 Pasar 1 kasus 1 Sistem 856 kali
3.	Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	10. Revisi Perda Retribusi Daerah	1 Perda
		11. Dokumen evaluasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan	12. Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	12 Dokumen
5.	Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD	13. Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	2 Dokumen

Mataram , 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19610915 199303 2 001

Lampiran LAKIP

PENGUKURAN KINERJA

SKPD/Unit Kerja : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN (JENIS PENDAPATAN)		INDIKATOR KINERJA		Satuan	TARGET TH 2016	REALISASI					CAPAIAN TAHUN 2016 TERHADAP				Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra)
No	Uraian	No	Uraian			TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016 (sementara)	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Target Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11:9x100-100%	13=11:10x100-100%	14=11:6x100	15=11:16x100	16
I	PAD				1.450.044.930.319,00	745.979.866.410,64	847.866.511.218,40	1.116.743.519.598,45	1.372.108.887.856,75	1.359.744.173.372,97	21,76	-0,90	93,77	77,13	1.762.840.194.000,00
A	Pajak Daerah				1.037.549.599.000,00	580.615.755.680,00	697.834.322.423,00	904.782.698.514,00	1.010.655.242.476,00	1.003.260.953.668,00			96,70		
B	Retribusi Daerah				29.890.858.000,00	10.129.107.556,00	12.929.180.980,14	19.838.517.587,00	24.357.011.304,86	29.791.594.549,00			99,67		
	- Retribusi Jasa Umum				19.059.250.000,00	3.119.071.148,00	5.687.298.692,14	11.814.847.571,00	14.152.929.298,86	19.214.094.092,00			100,81		
	- Retribusi Jasa Usaha				9.182.718.500,00	6.885.436.408,00	7.114.927.288,00	7.885.929.016,00	8.410.235.706,00	8.816.358.857,00			96,01		
	- Retribusi Perizinan Tertentu				1.648.889.500,00	124.600.000,00	126.955.000,00	137.741.000,00	1.793.846.300,00	1.761.141.600,00			106,81		
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				157.964.885.190,00	53.821.735.694,00	52.715.118.386,00	57.353.289.032,00	63.229.181.808,00	72.827.611.744,00			46,10		
	- Bank NTB				59.958.450.102	44.001.427.698,00	46.829.294.719,00	49.654.261.963,00	54.269.261.963,00	59.958.510.102,00			100,00		
	- BPR LKP				11.374.571.865	3.062.372.970,00	5.463.708.621,00	6.988.695.098,00	8.121.158.634,00	11.631.764.969,00			102,26		
	- PT. Gerbang Mas NTB				1.000.000.000	5.370.000,00	400.000.000,00	680.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00			100,00		
	- PT. Daerah Maju Bersaing (DMB)				85.406.400.000	6.700.000.000,00	-	-	0,00	0,00			0,00		
	- Deviden PT. Suara Nusa Media Pratama				0	-	-	-	0,00				0,00		
	- PT. Asuransi Bangun Askrida				88.761.211	-	22.115.046,00	30.331.971,00	88.761.211,00	100.634.661,00			113,38		
	- PT. Jam krida				136.702.012	52.565.026,00	-	-		136.702.012,00			100,00		
D	Lain-Lain PAD Yang Sah				224.639.588.129,00	101.413.267.480,64	84.387.889.429,26	134.769.014.465,45	273.867.452.267,89	253.864.013.411,97			113,01		
II	DANA PERIMBANGAN				2.333.604.004.580,00	1.054.470.183.114,00	1.075.004.985.595,00	1.212.086.447.141,00	1.450.695.264.778,00	2.583.032.589.905,00	113,11	78,05	110,69	141,22	1.829.091.365.000,00
A	Dana Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak				247.954.406.000,00	191.526.128.114,00	158.244.269.595,00	177.032.677.141,00	147.804.397.778,00	375.036.424.549,00			151,25		
B	DAU				955.792.513.580	809.617.715.000,00	859.353.026.000,00	980.390.340.000,00	1.088.633.717.000,00	1.117.691.709.000,00			116,94		
C	DAK fisik dan non fisik				1.129.857.085.000	53.326.340.000,00	57.407.690.000,00	54.663.430.000,00	214.257.150.000,00	1.090.304.456.356,00			96,50		
III	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH				19.284.510.900	442.367.135.000,00	456.686.703.487,06	478.464.643.742,20	625.310.001.000,00	7.120.189.000,00	-98,51	-98,86	36,92	1,02	695.845.335.000,00
	Total Pendapatan				3.802.933.445.799,00	2.242.817.184.524,64	2.379.558.200.300,46	2.807.294.610.481,65	3.448.114.153.634,75	3.949.896.952.277,97	40,70	14,55	103,86	92,12	4.287.776.894.000,00

Mataram, 2017
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H.Iswandi, M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153